

ABSTRAK
PENGGUNAAN E-BUPOT UNIFIKASI DAN KEPATUHAN PELAPORAN
PAJAK UNIFIKASI PADA DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI
LAMPUNG TAHUN 2022

Oleh :
BIDARI KHOTIJAH

Sektor perpajakan menjadi sumber pendapatan Negara yang paling tinggi. Dengan hal tersebut perpajakan menjadi fokus penting untuk peningkatan perekonomian Negara. Bendahara Instansi pemerintah merupakan salah satu wajib pajak yang ada di Indonesia. Bendahara Instansi pemerintah sebagai wajib pajak memiliki kewajiban untuk melaksanakan pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak. Kewajiban khusus ini didampingi juga dengan aplikasi berbasis web E- Bupot Unifikasi yang mampu membawa kemudahan dalam proses kegiatan perpajakan karena dengan satu aplikasi web dapat melaksanakan beberapa kewajiban pasal dalam satu masa. Di samping hal tersebut kemudahan yang ditawarkan menggunakan E- Bupot Unifikasi haruslah didampingi dengan kepatuhan baik penyetoran dan pelaporan pajak unifikasi. Adanya kekurangan prosedur di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung mengharuskan adanya penelitian terkait e-bupot unifikasi yang menyebabkan kewajiban perpajakan belum terlaksana secara menyeluruh.

Kata Kunci: Pajak unifikasi, Bendahara, E-Bupot